

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI AKOMODASI DAN TATA KELOLA KPU LAMPUNG DALAM MENGELOLA KONFLIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG PERIODE 2014-2019

Oleh

ALVINDRA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014-2019, menganalisis implikasi konflik antara KPU Lampung dan Gubernur Lampung pada Pilgub Lampung periode 2014-2019, dan menganalisis fungsi akomodasi dan tata kelola KPU Lampung dalam mengelola konflik pada Pilgub Lampung periode 2014-2019. Teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas dan teori transformasi politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Operasional variabel dalam penelitian ini menggunakan konsep manajemen konflik yaitu fungsi akomodasi dan fungsi tata kelola. Fungsi akomodasi menggunakan indikator partisipasi, bentuk fasilitas, bentuk inisiatif, usaha, dan bentuk mediasi. Sedangkan fungsi tata kelola menggunakan indikator transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan keadilan, serta supremasi hukum. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara narasumber atau informan KPU Lampung, Bawaslu Lampung, dan pengamat politik Lampung (Akademisi, LSM, Aktivistis, dan Jurnalis) dan data sekunder diperoleh dari undang-undang, peraturan-peraturan, dan sumber bacaan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor penyebab konflik dalam pelaksanaan Pilgub Lampung periode 2014-2019, yaitu faktor ketidakpercayaan, faktor kepentingan, faktor komunikasi, dan faktor legal formal. Implikasi konflik dalam pelaksanaan Pilgub Lampung periode 2014-2019 menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, antara lain: konflik mendorong munculnya ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan serta meningkatkan kualitas keputusan, namun konflik juga menimbulkan prasangka-prasangka negatif di masyarakat. Fungsi akomodasi dan tata kelola yang diselenggarakan KPU Lampung sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengelola konflik pada Pilgub Lampung periode 2014-2019. Indikator akomodasi (partisipasi, bentuk fasilitas, bentuk inisiatif, usaha, dan bentuk mediasi) dan indikator tata kelola (transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan keadilan, serta supremasi hukum) merupakan upaya KPU Lampung yang tepat dalam penerapan manajemen konflik untuk mengelola konflik pada Pilgub Lampung periode 2014-2019.

Kata kunci: Akomodasi, Tata Kelola, KPU Lampung, Manajemen Konflik, Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014.